

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Lia Puspa Sari¹, Ju'im Thaap², Titi Darmi³
Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2,3}
titi.harmadi@gmail.com³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Analisis data yang digunakan peneliti melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan *verification* atau validasi data kepada tokoh masyarakat. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah Nomor 02 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah telah menjalankan kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu telah sampai pada target grup, namun masih ditemukan kendala seperti kekurangan sarana dan prasarana, berimplikasi pada proses pengangkutan sampah. Simpulan penelitian ini bahwa analisis kebijakan pengelolaan sampah belum memberikan pengaruh sosial ekonomi untuk masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan, Lingkungan, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the implementation of waste management policies at the Bengkulu City Environmental Service. The method used in this research is descriptive qualitative. Data sources consist of primary and secondary data. The data analysis used by the researcher went through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and data verification or validation to community leaders. The results of the study found that the implementation of the regional regulation policy No. 02 of 2011 on waste management had implemented the policy in accordance with the established standards and procedures. The implementation of waste management policies in Bengkulu City has reached the target group, but there are still obstacles such as lack of facilities and infrastructure, which have implications for the process of transporting waste. The conclusion of this study is that the analysis of waste management policies has not yet provided a socio-economic impact for the community.

Keywords: Environment, Policy, Waste Management

PENDAHULUAN

Padatnya jumlah penduduk Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan pengaruh yang begitu besar terhadap lingkungan, kepadatan penduduk membuat bertambahnya volume sampah di Indonesia terlebih sampah plastik salah satu jenis sampah yang sulit terurai. Selama bertahun-tahun masalah sampah semakin menjadi ancaman yang harus menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia pasalnya belum ada cara yang ditemukan untuk benar-benar menyelesaikan masalah sampah ini. Untuk mengatasi permasalahan di atas Pemerintah Daerah penting memiliki Sumber Daya (SDM) yang mumpuni. SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mumpuni merupakan SDM ASN yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan dengan tepat (Sri, 2017). Selain itu, Pemerintah Daerah penting menanamkan budaya yang tersistem dalam setiap unit di lingkungan Pemerintahan (Darmi, 2013).

Di Kota Bengkulu sampah juga menjadi persoalan yang sangat meresahkan, pertambahan penduduk dan berubahnya pola konsumsi masyarakat menimbulkan pengaruh pada bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang makin beragam. Sehingga dalam perwujudan pengelolaan, Pemerintah Kota Bengkulu telah memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebagai bentuk tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menerbitkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu.

Pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih menyisakan permasalahan, produksi sampah masih

terus meningkat dari tahun ke tahun sementara peningkatan kemampuan pengangkutan sampah masih minim dan tertinggal jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi sampah. Pada kenyataannya dalam sebuah kebijakan tidak sepenuhnya memecahkan sebuah masalah, kebijakan bahkan dapat menimbulkan masalah baru (Dunn, 2013). Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu tidak serta merta membuat masalah sampah berakhir, masih banyak masalah yang timbul meski telah adanya kebijakan tersebut.

Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan Kota Bengkulu menunjukkan bahwa setiap harinya Kota Bengkulu menyetorkan 260-280 Ton sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul, Kota Bengkulu. Ratusan sampah itu berasal dari sampah rumah tangga maupun sampah pasar, yang terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Selain data diatas masih terdapat masalah-masalah lain yang terjadi mengenai persampahan dikota Bengkulu seperti sampah yang dibuang sembarangan disejumlah sudut Kota Bengkulu seperti rawa, siring, pantai, maupun di jalan.

Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas munculah sebuah pertanyaan apakah kebijakan pengelolaan sampah yang sudah dibuat benar-benar mengarah pada pemecahan masalah. Sebab itu menjadi penting untuk meninjau lagi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu dengan tujuan menemukan permasalahan yang ada pada kebijakan dan permasalahan yang ingin dipecahkan melalui kebijakan tersebut. Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh Hardiansyah pada tahun 2014

dengan lokasi penelitian di kota Palembang, yang fokus melihat bagaimana model implementasi kebijakan mengenai pengelolaan persampahan, dari hasil penelitian Hardiansyah dapat disimpulkan bahwa model implementasi kebijakan pengelolaan kebersihan dan persampahan di Kota Palembang lebih mengarah kepada model implementasi kebijakan dari Edwards III, yang meliputi empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah komunikasi, sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi, yang mana realita menunjukkan bahwa faktor komunikasi, sikap pelaksana, sumber daya, dan struktur birokrasi yang dikemukakan oleh Edwards III, perlu ditambah dengan faktor lain, yaitu "komitmen pemimpin."

Penelitian ini berfokus pada pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, dengan melalui pemantauan kebijakan berdasarkan teori (2003) pemantauan dari William N. Dunn yaitu eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akuntansi. Peneliti menemukan fakta yang terjadi berdasarkan pemantauan sementara yang dilakukan baik dari media online maupun mendatangi beberapa titik lokasi di kota Bengkulu, peneliti menemukan banyak masalah yang terjadi seperti masih banyak sampah berserakan di sembarang tempat, masyarakat tidak memiliki kotak sampah pribadi di depan rumah, dan sampah yang berserakan di sekitar tempat wisata. hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum berjalan dengan baik maka perlu dilakukan pemantauan baik dari segi eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akuntansi sesuai dengan indikator yang digunakan

peneliti yaitu teori pemantauan dari William N. Dunn.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu mulai dari tata pelaksanaan pengelolaan, dan pelaksanaan di lapangan. Maka baik peneliti ataupun pembaca dapat mengetahui apakah kebijakan telah dapat menyelesaikan masalah sampah yang terjadi di Kota Bengkulu, penelitian ini berjudul "analisis kebijakan pengelolaan sampah pada dinas lingkungan hidup kota Bengkulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, untuk mengetahui lebih mendalam masalah atau fenomena masalah persampahan yang terjadi di kota Bengkulu yang bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan secara rinci baik suatu keistimewaan ataupun keburukan dalam fenomena sosial. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. data primer diperoleh melalui wawancara kepada actor pelaksana kebijakan. data sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen, serta laporan yang mempunyai hubungan erat dengan rumusan masalah yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan peneliti melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan *verification* atau validasi data yang dilakukan dengan konfirmasi kepada tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah

Analisis kebijakan pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, yang peneliti lakukan adalah terkait dengan kebijakan pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu apakah berjalan baik atau tidak berdasarakan implementasi kebijakan perda Nomor. 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah dengan menggunakan fungsi pemantauan menjadi indikator sebagai berikut:

Eksplanasi

Melihat bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dalam menjalankan peraturan daerah No. 02 Tahun 2011 sehingga tujuan yang terdapat di dalamnya dapat terealisasi dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti katakan bahwa hal yang menjadi sebab mengapa fakta yang terjadi di lapangan sekarang tidak sejalan dengan tujuan kebijakan yang dibuat dan diterapkan. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu belum benar-benar maksimal, seperti kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda yang berlaku sebab dengan hanya memberikan sosialisasi per 3 Bulan sekali dirasa hal itu kurang efektif karena mengingat banyaknya masyarakat Kota Bengkulu seharusnya menjadikan pertimbangan bagi dinas untuk melakukan sosialisasi dengan lebih massif ke seluruh lapisan masyarakat.

Kurangnya ketegasan dari dinas dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap kebijakan yang ada menjadi salah satu faktor mengapa

tujuan dari kebijakan sulit dicapai, perubahan masih belum bisa dirasakan sampai sekarang. Dalam penelitian ini peneliti menemukan bahwa hasil dari kebijakan publik masih berbeda dengan tujuan dari kebijakan.

Setelah kurang lebih 9 tahun kebijakan ini diimplementasikan masih ada sampah yang berserakan baik di pinggir jalan, siring, got, atau bahkan di median jalan hal ini menunjukkan bahwa kebijakan belum terimplementasikan dengan baik, sebab sampah yang masih saja berserakan disebabkan oleh masih ada masyarakat yang enggan menuruti aturan yang dijalankan dengan tidak, membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Penelitian jurnal wijaya dkk menjelaskan bahwa, terdapat beberapa perilaku warga dan petugas sampah dalam mengelola sampah yang diamati misalnya cara dalam mewadahi sampah baik menggunakan kantong plastik, tong dari drum, keranjang, ember bekas cat, dan tembok yang dibuat secara permanen.

Pada saat tahap pengumpulan dan pemindahan sampah, peneliti mengamati bagaimana cara petugas LPM dalam mengumpulkan sampah dari sumber sampah yang akan ditempatkan pada TPS, baik dengan menggunakan gerobak maupun yang menggunakan motor roda tiga. Sampah yang sudah terkumpul ditempat pembuangan sementara (TPS) tersebut kemudian akan dibuang ke tempat pembuangan akhir yang terletak di Air Sebakul oleh pihak Dinas Kebersihan.

Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pihak LPM diatur dalam peraturan daerah Nomor. 02 tahun 2011 dalam bab III bagian kedua yaitu pada pasal 05 sampai 15, disebutkan dalam pasal 5 yaitu: (a).

LPM melakukan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman dan tempat usaha industri. (b). Dalam penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPM ataupun beberapa LPM membentuk organisasi kebersihan. (c). Tata cara pembentukan dan susunan organisasi kebersihan sebagaimana dikatakan pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Berdasarkan teori W. N. Dunn (2003) mengatakan bahwa eksplanasi digunakan untuk memantau dan mengumpulkan informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda. Dari hasil temuan yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian antara tujuan dibuatnya kebijakan dengan apa yang diimplementasikan dilapangan, seperti besaran retribusi yang dipungut oleh pihak ke 3 yang ditunjuk oleh LPM ditingkat kelurahan tidak sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan, banyak masyarakat yang tidak memiliki kotak sampah pribadi terlebih pemisahan organik dan an-organik.

Kepatuhan

Kepatuhan digunakan peneliti untuk dapat mengetahui implementasi kebijakan, apakah telah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Mengenai apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan, dibuktikan peneliti telah sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan melakukan penanganan, pengurangan, dan pengolahan sampah akan tetapi masih ada hambatan yang

menjadikan implementasi kebijakan belum terimplementasikan dengan sempurna, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat banyaknya sampah yang masih berserakan di Median Jalan, Selokan, Got, dan Pinggir Jalan yang disebabkan oleh kurangnya fasilitas tempat sampah yang tersedia. Seperti di Jalan Hibrida, Pagar dewa dan sekitaran Pantai di Kota Bengkulu.

Berdasarkan beberapa pendapat dari informan mengenai kepatuhan, maka peneliti menginterpretasikan bahwa implementasi dari kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu belum terlaksana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari masih ada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai kebijakan yang ditetapkan dan dijalankan yaitu Peraturan daerah Nomor. 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, lebih jauh lagi dilihat dari masih banyaknya sampah yang berserakan di Kota Bengkulu baik di Selokan, Got, Sekitaran Pinggir Pantai, Pinggir Jalan, bahkan di Median Jalan. Hal ini disebabkan oleh masih kurangnya armada pengangkutan sampah dan kurang banyaknya TPS yang disebarkan di Kota Bengkulu sehingga menyebabkan masyarakat yang jauh dari lokasi enggan untuk membuang sampah sampai ke TPS (Tempat Pembuangan Sementara).

Tabel 1. Rincian Sarana Dan Prasarana Angkutan Sampah

| Angkutan TPA | Pemilik | Jumlah (Unit) | Kondisi | | Armada Masuk | Volume (M3) |
|---------------|-----------|---------------|---------|------|--------------|-------------|
| | | | Rusak | Baik | | |
| Kontener | Pemkot | 84 | 33 | 51 | 36 | 4 |
| Ame Roll | Pemkot | 14 | | 13 | 13 | |
| Dumtruck | Pemkot | 16 | 2 | 14 | 13 | 5 |
| L-300 | Pemkot | 3 | | 2 | 3 | 2 |
| Roda 3 | Kelurahan | 50 | | 50 | 7 | 0,8 |
| Carry | Swasta | 20 | | 20 | 4 | 12 |
| Truck Roda 6 | Swasta | 4-5 | | | 0,00 | 6 |
| Jumlah | | | | | | |

Sumber: Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu

Rincian sarana dan prasarana yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sebagai alat pengangkutan sampah mulai dari TPS menuju TPA Air Sebakul. data yang didapatkan peneliti menunjukkan bahwa masih banyak alat pengangkutan dengan kondisi masih baik dengan jumlah sampah yang terangkut ke TPA adalah: 225,40 m³/hari 157,78 jika 1 m³ sampah = 0,33 ton timbulan: 263,778 kg/hari, 74,382 ton/hari. 2018: 264 ton/hari, 2019: 270 ton/hari.

Perda Nomor. 02 Tahun 2011 sebenarnya telah mengatur mengenai sanksi bagi siapa saja yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, bab XI pasal 38 berbunyi: pada ayat 1 dikatakan "Walikota bisa menerapkan sanksi administratif terhadap pihak ketiga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota berhak memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Maksud dari perizinan disini ketika pihak Dinas atau LPM bekerja sama dengan pihak ke 3 yang biasanya melakukan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS (tempat penampungan sementara) dan terjadi pelanggaran misal pemungutan retribusi diluar aturan

pemerintah maka pemerintah kota berwenang untuk memberikan sanksi.

Seperti yang dijelaskan pada ayat 2 yaitu Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (2) berupa: (a). Paksaan Pemerintahan, (b). Uang paksa; dan/atau, (c) Pencabutan izin.

William N. Dunn (2003) menjelaskan bahwa kepatuhan digunakan untuk menetapkan apakah tindakan dari para administrator program, staf, dan pelaku lain telah sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator, instansi pemerintah, dan lembaga profesional. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa beberapa tindakan dari implementor kebijakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti pengangkutan sampah dari TPS (Tempat Penampungan Sementara) menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir), memberikan sosialisasi terhadap kebijakan pengelolaan sampah, dan mengangkut sampah masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, disamping itu masih terdapat tindakan yang belum sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan seperti pengangkutan sampah TPS yang bermasalah disebabkan oleh kurangnya armada pengangkut sampah.

Permasalahan yang terjadi pada pembahasan di atas sempat dibahas oleh pemerintah Kota Bengkulu dan menghasilkan suatu kebijakan yang akan dimunculkan untuk mengatasi masalahnya, yaitu dengan membuat bank sampah. Seperti dijelaskan dalam penelitian Hasrun Syarif Dongoran, dkk (2018), yang berjudul “Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah” dikatakan dimana masyarakat dapat membawa sampah tertentu, lalu bisa diolah menjadi bahan bermanfaat. Salah satunya ialah Bank Sampah Mutiara Medan, melalui bank sampah kita menabung sampah dan mendapatkan uang. Selain memberikan keuntungan ekonomi, sudah pasti keberadaan Bank Sampah akan memberikan keuntungan untuk kebersihan lingkungan.

Auditing (Pemeriksaan)

Audit digunakan peneliti sebagai fungsi untuk mengetahui apakah sumberdaya dan pelayanan benar-benar sudah sampai pada kelompok sasaran (target grup). Berdasarkan hasil yang ditemukan peneliti dapat dikatakan mengenai SDM (Sumber Daya Manusia) dan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah memberikan usaha yang terbaik untuk masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu selalu menyamaratakan setiap masyarakat dalam pemberian pelayanan mengenai pengelolaan persampahan di Kota Bengkulu hanya saja dalam hal pemberian pemahaman mengenai Perda yang dijalankan dapat dikatakan baik pihak dinas, LPM ataupun pihak ke-3 belum 100% sampai pada target grup.

Standar dari pelayanan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup

Kota Bengkulu adalah dengan berpacu pada motto dan maklumat pelayanan mereka yaitu: Motto dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu adalah “ramah dalam pelayanan, cepat dalam pelaksanaan, kepuasan yang kami utamakan”. Adapun maklumat pelayanan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu adalah “kami seluruh penyelenggaraan/ karyawan dan karyawati Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar yang telah dibuat dan apabila tidak menepati janji siap menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”

Salah satu bukti Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menjalankan motto dan maklumat pelayanan adalah dengan melihat terkumpulnya sampah di TPA Air Sebakul yang menunjukkan bahwa sampah di Kota Bengkulu benar-benar diangkut dari sumber sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). walaupun jika melihat kondisi TPA yang ada di kota Bengkulu saat ini sebenarnya sedang membutuhkan perhatian lebih sebab volume sampah yang tertampung disana saat ini sudah sangat mencapai batas maksimal, yang artinya perlu dilakukan perluasan atau pembangunan kembali TPA. seperti dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Johannes Sembiring dkk, 2018, dengan judul “Analisis Perencanaan Pembangunan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah” dikatakan bahwa pentingnya pembangunan TPA dilakukan sebab, besarnya timbunan sampah yang tidak dapat ditangani tersebut akan menyebabkan berbagai permasalahan baik langsung maupun tidak langsung bagi penduduk apalagi daerah disekitar tempat penumpukan. Dampak langsung dari penanganan

sampah yang kurang bijaksana diantaranya adalah timbulnya berbagai penyakit menular maupun penyakit kulit serta gangguan pernafasan, sedangkan dampak tidak langsung diantaranya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air di sungai karena terhalang timbunan sampah yang dibuang ke sungai. Selain penumpukan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), jumlah sampah pun akan semakin meningkat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Dunn (2013) audit digunakan untuk melihat apakah sumberdaya dan pelayanan yang peruntukan untuk kelompok sasaran ataupun konsumen tertentu (individu, keluarga, kota, dan negara bagian, serta wilayah) memang sudah sampai pada mereka. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka ditemukan fakta bahwa SDM dan pelayanan telah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan.

Akuntansi

Dengan Fungsi untuk mengetahui perubahan sosial-ekonomi apa saja yang telah terjadi setelah implementasi suatu kebijakan dari waktu ke waktu. Mengenai perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah kebijakan diimplementasikan dari waktu ke waktu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu terkhusus bidang penanganan sampah dan limbah B3 dijelaskan bahwa perubahan sosial lebih banyak terjadi di bandingkan dengan perubahan ekonomi.

Data komposisi sampah yang masuk ke TPA Air Sebakul, TPA Air Sebakul terletak di Kelurahan Sukarami Kota Bengkulu dimana jarak lokasi dari pusat kota 15 KM dengan

kondisi berbukit dan jurang. Dasar penggunaan lahan TPA Air Sebakul yaitu SK Walikota Madya KDH Tk. II Bengkulu No.194 tanggal 29 Juli 1991. TPA Air Sebakul Kota Bengkulu beroperasi dari tahun 1992.

TPA Air Sebakul Kota Bengkulu mempunyai lahan seluas 3Ha dengan menggunakan sistem pengelolaan Cara Metode *Sanitary landfill* (lahan urug saniter). Metode *Sanitary landfill* merupakan proses pembuangan akhir sampah yang dilakukan dengan cara sampah ditimbun kemudian dipadatkan, lalu ditutup dengan tanah yang berfungsi sebagai lapisan penutup. Penutupan lapisan dilakukan setiap hari pada saat akhir jam operasi.

Seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian Albana (2016), hal itu juga terjadi di Kota Bengkulu yaitu di Air Sebakul, masih banyak warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, sehingga para wanita bekerja setiap pagi dan sore hari untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sebagai seorang pemulung di TPA Air Sebakul, tentunya pekerjaan memulung sangat berat, karena setiap hari mereka harus berhubungan dengan benda-benda atau barang-barang yang kotor.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas maka dapat dikatakan bahwa perubahan sosial-ekonomi yang terjadi sejak kebijakan diimplementasikan sudah memberikan perubahan ditengah masyarakat, tetapi masih perubahan berskala kecil dalam artian tidak terjadi pada setiap masyarakat di Kota Bengkulu.

Perubahan ekonomi dapat sedikit dirasakan oleh masyarakat kota Bengkulu ataupun masyarakat perantau, dengan adanya peraturan daerah Nomor. 02 Tahun 2011 dimana dalam Perda itu mengatur bahwa

sampah rumah tangga ataupun sampah industri diangkut dari sumber sampah ke TPA (tempat pembuangan akhir) seperti yang diterangkan pada bab III pasal 27 yang menjelaskan bahwa Sisa sampah yang tidak dapat diolah ditempat pengolahan sampah terpadu akan diangkut menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA), Sampah sejenis sampah rumah tangga diangkut dari tempat sampah ke tempat pengolahan sampah terpadu, serta Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) lakukan oleh petugas Dinas dengan menggunakan mobil pengangkut sampah yang tertutup juga terpisah antara sampah organik maupun sampah anorganik.

Melihat isi peraturan daerah Nomor. 02 Tahun 2011 di atas jika dibandingkan dengan fakta di lapangan maka sangat berbanding terbalik seperti yang ditemukan peneliti di lapangan bahwa sampah yang berasal dari sumber sampah kemudian diangkut ke tempat pembuangan sementara tidak dilakukan pemisahan antara organik maupun anorganik, begitupun saat sampah dari TPS ini diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu menuju tempat pembuangan akhir peneliti tidak menemukan adanya pemisahan antara sampah organik dan anorganik.

Sebelumnya peneliti melakukan observasi kelapangan dengan mengunjungi TPA Air Sebakul dimana tempat ini menjadi tujuan terakhir dari pengelolaan sampah-sampah yang ada di Kota Bengkulu, peneliti menemukan bahwa semua sampah yang tertumpuk merupakan semua jenis sampah, yang artinya tidak dilakukan pemisahan antara sampah organik dan anorganik.

Hal inilah yang memunculkan peluang bagi masyarakat untuk menjadi pemulung demi untuk memenuhi perekonomian keluarga. Seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian Bara Albana, hal itu juga terjadi di Kota Bengkulu yaitu di Air Sebakul, masih banyak warga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, sehingga para wanita bekerja setiap pagi dan sore hari untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sebagai seorang pemulung di TPA Air Sebakul, tentunya pekerjaan memulung sangat berat, karena setiap hari mereka harus berhubungan dengan benda-benda atau barang-barang yang kotor.

Selanjutnya dari perubahan sosial yang muncul dengan diimplementasikannya peraturan daerah Nomor. 02 Tahun 2011 salah satunya dapat dilihat dari pengaruh pasal pengurangan sampah dalam perda yang berlaku, dimana terdapat masyarakat yang memanfaatkan sampah dengan menggunakan kreatifitas mereka, misal dengan mengubah sampah an-organik seperti botol minum, dan sampah plastik yang dirubah menjadi kerajinan tangan, ataupun sampah organik yang dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk kompos.

Data komposisi sampah yang masuk ke TPA (tempat pembuangan akhir) Air Sebakul seperti tertera dalam tabel di bawah:

Tabel2. Keterangan Komposisi Sampah TPA Kota Bengkulu

| NO | Komponen sampah | Persentase | Volume (M3)/Hari | | | | |
|---------------|-----------------|-------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Sampah basah | 65% | 246.27 | 262.97 | 292.22 | 342.22 | 347.22 |
| 2. | Kertas | 13% | 49.25 | 52.59 | 58.44 | 63.44 | 68.44 |
| 3. | Plastik | 11% | 41.68 | 44.5 | 49.45 | 54.45 | 59.45 |
| 4. | Kayu | 3% | 11.37 | 12.14 | 13.49 | 14.49 | 15.49 |
| 5. | Logam | 1% | 3.79 | 4.05 | 4.50 | 5.50 | 6.50 |
| 6. | Kaca/gelas | 1% | 3.79 | 4.05 | 4.50 | 5.50 | 6.50 |
| 7. | Karet/Kulit | 1% | 3.79 | 4.05 | 4.50 | 5.50 | 6.50 |
| 8. | Kain | 1% | 3.79 | 4.05 | 4.50 | 5.50 | 6.50 |
| 9. | Lain-Lain | 4% | 15.16 | 16.18 | 17.98 | 18.98 | 19.98 |
| JUMLAH | | 100% | 378.89 | 404.58 | 449.58 | 515.58 | 536.58 |

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu 2019)

Data menunjukkan bahwa, setiap tahunnya komposisi sampah basah selalu berada pada posisi pertama dimana sampah basah menjadi sampah terbanyak yang masuk ke TPA, jika hal ini dimanfaatkan maka hal ini bisa dijadikan peluang besar dalam penciptaan perubahan sosial ekonomi yang positif, baik bagi masyarakat maupun dinas terkait, sebabnya sampah basah adalah jenis sampah yang dapat dikelola kembali menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual misalnya diolah menjadi pupuk kompos yang dapat dimanfaatkan kembali baik oleh dinas maupun masyarakat.

Menurut William N. Dunn, akuntansi adalah fungsi monitoring yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan perhitungan atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya kebijakan publik dari waktu ke waktu. Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat Kota Bengkulu setelah kebijakan diimplementasikan hanya dirasakan oleh beberapa kelompok

masyarakat seperti pemulung, masyarakat yang diberdayakan menjadi penyapu jalan dan pengangkut sampah di kelurahan, serta beberapa masyarakat yang memiliki kreatifitas dalam pemanfaatan sampah menjadi kerajinan tangan.

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Henry Simamora, (2005) bahwa akuntansi adalah proses pengukuran aktivitas ekonomi suatu entitas dalam satuan uang dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Artinya kita melihat atau mengukur perubahan baik dari segi sosial maupun ekonomi apakah ada peningkatan pendapatan terhadap masyarakat dengan adanya kebijakan pengelolaan sampah yang telah dijalankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah sesuai dengan standar dan prosedur yang berpedoman pada Perda Nomor. 02 Tahun 2011 tentang

kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu akan tetapi masih ditemukan adanya pelaksanaan kebijakan yang belum sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kebijakan pengelolaan sampah. Dalam pemeriksaan (Audit) kebijakan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sudah sampai kepada kelompok sasaran atau target grup. Dalam pemantauan dibidang Akuntansi, kebijakan pengelolaan sampah belum memberikan pengaruh sosial ekonomi yang menyeluruh untuk masyarakat Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Albana, B. (2016). Kontribusi Wanita dalam Mendukung Perekonomian Keluarga (Studi pada Pemulung di TPA Air Sebakul. (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu). <http://repository.iainbengkulu.ac.id/286/>
- Dunn, W., N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Sri, S., Yuwanto, Y., & Sundarso, S. (2017). Capacity Building as Accelerator for Improving Autonomous Region Recently Knows as (DOB): Case Study in Seluma Distrcit Bengkulu Province, Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(3). DOI:10.5296/jpag.v7i3.11657
- Darmi, T. (2013). Budaya Organisasi, Kinerja Organisasi, dan Kinerja Aparatur. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(1), 7-10. <https://jap.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/1927>
- Hardiyansyah, H., & Effendi, R. (2014). Model Implementasi Kebijakan Publik dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Kota Palembang. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 30(1), 108-117. DOI:<https://doi.org/10.29313/mimbar.v30i1.572>
- Sembiring, J., Sihombing, M., & Suriadi, A. (2018). Analisis Perencanaan Pembangunan Lahan Tempat Pembuangan Akhir Sampah. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(1), 39-46. DOI:<https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1577>
- Dongoran, H. S., Harahap, R. H., & Tarigan, U. (2018). Implementasi Peraturan Walikota Medan tentang Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 8(1), 47-64. DOI:<https://doi.org/10.31289/jap.v8i1.1578>